

PARADIGMA BARU PENDIDIKAN MENUJU INTEGRITAS BANGSA DI ERA GLOBAL

Oleh: P. Sarjiman¹

Abstrak

Bangsa kita sedang mengalami berbagai cobaan. Dalam bidang sosial politik belum tercipta iklim yang sejuk dan kondusif untuk berjalan majunya pembangunan, stabilitas keamanan belum terjamin, ancaman disintegrasi bangsa sangat kasat mata, yang berimbas pada terpuruknya perekonomian. Tak terkecuali bidang pendidikan mengalami kegamangan dalam membentuk jati dirinya dalam mempersiapkan generasi muda dan sekaligus memecahkan berbagai persoalan bangsa yang multidimensional. Banyak sorotan bahwa "out put" pendidikan belum mampu memecahkan berbagai persoalan masyarakat termasuk persoalannya sendiri.

Agar "out put" pendidikan mampu mandiri dan memecahkan berbagai masalah masyarakat dan bangsa di era global ini, maka paradigma baru pendidikan perlu diciptakan pada setiap peristiwa pembelajaran seperti dikaitkannya pendidikan nilai, moral, etika, kerja sama, menghargai perbedaan, mentaati kesepakatan, dan nilai-nilai positif lainnya. Penjejalan ilmu pengetahuan kepada peserta didik dengan cara hafalan, indoktrinasi dan guru sebagai satu-satunya sumber ilmu pengetahuan hendaknya mulai ditinggalkan. Peserta didik perlu diberi kesempatan untuk berpikir, bereksplorasi, berekspresi, melontarkan pertanyaan dan berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, peserta didik akan tumbuh sebagai insan yang aktif, kreatif, inovatif, setia kepada tanah air memelihara persatuan dan kesatuan dan dapat bekerja sama. Dan yang paling penting adalah peserta didik nantinya mampu mengaplikasikan ilmunya, sehingga tumbuh rasa percaya diri dan kemandirian. Kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama baik di tingkat lokal, nasional, maupun global sangat diperlukan di era ini, agar tidak tersingkir di percaturan regional, nasional dan dunia.

Konsep kunci: pendidikan nilai, kemandirian, persatuan-kesatuan dan era global.

¹ Dosen Jurusan PGSD FIP- UNY

Pendahuluan

Bangsa kita, Indonesia sedang prihatin dengan berbagai percobaan di sana sini. Dimulai dengan krisis moneter pada tahun 1997 dan sekaligus krisis kepercayaan terhadap pemerintah yang ditandai dengan lengsernya presiden Soeharto; berturut-turut diikuti peristiwa yang menyedihkan seperti amuk masa, peristiwa Banyuwangi, pertikaian di Maluku, kerusuhan dan pertikaian antar etnik di Sambas dan Sampit, serta masih banyak peristiwa-peristiwa lain yang terpaksa memerlukan “tumbal” jiwa anak bangsa yang tidak sedikit. Berbagai bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang terjadi di beberapa daerah menambah keprihatinan bangsa ini.

Stabilitas politik yang menjadi prasyarat berjalannya roda pemulihan ekonomi masih “carut marut” serta jauh dari mantap dan terkendali. Daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah berpotensi untuk memerdekakan diri, terpisah dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antara para elit politik sendiri belum memiliki satu kata, satu ide, satu bahasa, satu kesepakatan dan satu langkah dalam membangun dan memulihkan kondisi bangsa yang makin terpuruk ini. Mereka saling menyalahkan dan bahkan menghujat serta menjatuhkan demi kepentingan pribadi dan golongan. Tidak sedikit mereka yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya dan yang paling sering adalah korupsi. Indonesia adalah negara terkorup di dunia, pada tahun 2000, merupakan juara kedua di Asia, dan juara kelima di dunia setelah Nigeria, Somalia dan Ukraina, serta bahkan telah sampai tingkat korupsi dari hasil korupsi (Revrison Baswir, 2001:8).

Peristiwa-peristiwa seperti di muka menunjukkan adanya kemerosotan disiplin dan moral serta adanya tingkat kebrutalan, kekejaman pada berbagai kerusuhan dan pertikaian menggambarkan seolah-olah bangsa Indonesia bukan bangsa yang beradab dan berkebudayaan tinggi. Gambaran bahwa bangsa

Indonesia adalah bangsa yang ramah dan suka menjamu (*friendly*), mulai luntur di mata bangsa-bangsa lain di dunia ini.

Keadaan ini agaknya berakar pada sangat lemahnya modal dasar pembangunan, yaitu "Sumber Daya Manusia". Kenyataan ini terjadi karena sistem pendidikan nasional yang merupakan wahana utama pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan sangat lemah. Pendidikan nasional belum merupakan landasan utama untuk membangun bidang-bidang kehidupan lainnya dalam rangka pembangunan nasional secara menyeluruh. Meskipun pada semua jenis dan jenjang pendidikan minat dan partisipasi masyarakat cukup baik dan menggembirakan, namun hasil yang dicapai belum memadai, terutama bila dikaitkan dengan kualitas dan relevansinya dengan kebutuhan pembangunan. Dengan kata lain, pendidikan di Indonesia belum mampu mendukung Sistem Nasional (sosial politik negara bangsa) yang mantap dalam memasuki abad ke-21. Berbagai gejolak sosial, politik dan dampaknya pada krisis ekonomi menunjukkan bahwa proses transformasi budaya yang berlangsung tidak terarah menuju tertatanya sistem nasional yang mantap. Etika politik, budaya demokratis, penguasaan Iptek dan kemampuan mengelola ekonomi moderen belum dimiliki dan belum merasuk ke diri manusia Indonesia pada umumnya, termasuk kaum intelektual dan elitnya.

Biaya pendidikan baik dari pemerintah maupun masyarakat makin meningkat sejalan dengan meningkatnya minat dan peranserta masyarakat. Kelemahan utama adalah tidak efisiensinya terutama efisiensi internal pengelolaan biaya yang tersedia karena tingkat kebocoran cukup tinggi (kira-kira 30%), serta subsidi pemerintah dari lembaga-lembaga swasta belum proporsional (Agus F. Tangyong, 2001:1). Sarana-prasarana pendidikan relatif cukup secara kuantitas, namun di beberapa lokasi Sekolah Dasar sudah rusak. Kebijakan yang sentralistik yang selama ini berlaku, cenderung mematikan kreativitas dan partisipasi masyarakat, sehingga pengelolaannya tidak efisien. Sistem manajemen yang

terlalu sentralistik dengan birokrasi yang sangat ketat selama ini mengakibatkan pendidikan menjadi kurang efektif, kurang efisien dan kurang relevan dengan kebutuhan SDM dalam pembangunan bangsa yang semakin mengglobal ini. Ditambah pula kurang jelasnya peran masyarakat dalam pengambilan kebijakan pendidikan dan implementasinya. Dalam bidang pendidikan sendiri timbul beberapa masalah antara lain: 1) merosotnya moral dan akhlak peserta didik; 2) kurangnya pemerataan kesempatan dan fasilitas pendidikan; 3) rendahnya mutu pendidikan; 4) rendahnya efisiensi internal dan eksternal pendidikan serta pelatihan; 5) dan SDM yang belum profesional (Tilaar, 1998). Maraknya jual beli ijazah mulai dari ijazah SLTA, Sarjana, S2, dan bahkan S3 membuat orang yang benar-benar mengkaji ilmu sejati menjadi mengendor semangatnya. Gelar MM, MBA, dan bahkan Dr (Ph.D), dapat diperoleh hanya cukup mengeluarkan uang kurang dari puluhan juta rupiah. Kejadian ini benar-benar mencemari pendidikan kita.

Memahami Bangsa Indonesia Bersatu di Era Global

Gambaran Bangsa Indonesia yang terintegrasi tidak jauh dengan konsep masyarakat Indonesia baru atau masyarakat madani yang telah banyak dibicarakan orang. Masyarakat tersebut menghargai perbedaan pendapat, suku, ras, agama dan perbedaan-perbedaan lain yang tentu ada dan dimiliki oleh manusia sebagai insan ciptaan Tuhan di dunia ini. Di dunia ini tidak ada orang sama kecuali dengan dirinya sendiri. Maka kita harus saling menghargai dan menghormati walaupun berbagai perbedaan ada di sana sini. Perbedaan merupakan kekayaan budaya bangsa dan bukan menjadi sumber konflik demi kepentingan pribadi dan golongan. Bangsa Indonesia kini dan yang akan datang harus menjunjung supremasi hukum, demokratisasi, kebebasan mengutarakan pendapat dan berserikat, berkeadilan dan pemerataan, penghormatan terhadap

HAM, mengedepankan akal dari pada *okol* (menjauhkan tindak kekerasan dan kekejaman) serta membangun *civil society*. Dengan adanya keadilan, potensi rakyat dapat dikembangkan, supremasi hukum dijunjung tinggi, tidak mengedepankan kekuatan dan banyaknya pendukung dan pengikut serta konstitusi adalah sarana untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kebahagiaan. Manusia adalah makhluk sosial yang harus bekerja sama. Kerjasama diperlukan untuk melanjutkan keturunan dan kelangsungan hidup manusia. Manusia dapat bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan pokok dan mempertahankan diri. Masyarakat Indonesia bersatu yang diidamkan menurut Tilaar (1999) paling tidak memiliki ciri seperti berikut ini.

1. Kesukarelaan. Bangsa Indonesia yang bersatu bukanlah bangsa paksaan tetapi yang mempunyai komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama.
2. Keswasembadaan. Bangsa Indonesia yang bersatu harus memiliki kemandirian, tidak tergantung kepada negara dan bangsa lain. Negara merupakan kesepakatan bersama sehingga tanggung jawab yang lahir dari kesepakatan tersebut adalah juga tuntutan dan tanggung jawab dari masing-masing anggota bangsa.
3. Menjunjung tinggi supremasi hukum. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang patuh terhadap nilai-nilai hukum.

Bangsa Indonesia bersatu memiliki karakteristiknya sendiri. Berdasarkan karakteristiknya, dibangun bangsa Indonesia yang universal. Karakteristik Indonesia bersatu tersebut antara lain adanya keragaman budaya Indonesia yang merupakan dasar pengembangan identitas bangsa Indonesia dan kebudayaan nasional. Di dalam keanekaragaman budaya Indonesia ini penting diperlukan saling pengertian dari sesama anggotanya. Yang penting di dalam bangsa yang memiliki masyarakat yang bhineka ialah adanya saling pengertian. Perbedaan bukanlah merupakan kelemahan, namun justru merupakan dinamika dari suatu

kehidupan bersama dalam bangsa Indonesia bersatu. Perbedaan nilai-nilai dari suatu suku yang satu dengan yang lain tidak berakhir dengan kekerasan dan tidak berarti disintegrasi. Di dalam masyarakat, bangsa yang demokratis, terjadinya benturan-benturan nilai justru akan memperkaya horison kehidupan masyarakat. Karena perlunya toleransi yang tinggi, maka penting juga menumbuhkan saling pengertian dan bukan indoktrinasi yang berusaha untuk melenyapkan perbedaan.

Bangsa Indonesia bersatu yang diinginkan adalah bangsa yang di dalamnya terdiri dari komponen masyarakat dengan sistem politik yang berkedaulatan rakyat. Sistem ekonomi yang diwujudkan adalah sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuatan ekonomi masyarakat daerah sampai pelosok pedesaan yang memiliki keunggulan kompetitif dan bertumpu pada pasar domestik serta luar negeri dengan memanfaatkan sumber daya domestik.

Dengan demikian, untuk jangka panjang akan terwujud suatu bangsa kesatuan yang berkehidupan politik yang demokratis dengan pemerintahan yang bersih, bermoral dan bertanggung jawab (*clean government and good governance*). Di dalam mengembangkan kehidupan yang demokratis akan dibangun sistem hukum nasional yang terbuka bagi tatanan global, mengakomodasikan hukum adat, hukum agama yang berlaku serta menormalisasikan hukum ketatanegaraan yang berlaku dengan menjunjung tinggi supremasi hukum (*rule of law*). Dengan diakomodasinya hukum adat, kebiasaan dan kebudayaan suatu suku / etnis tetap dihormati dan justru dijadikan kekayaan budaya Nusantara. Perbedaan-perbedaan yang ada antar suku ras, agama tidak dijadikan dalih untuk kepentingan pribadi atau golongan sehingga tidak perlu berakhir dengan kekerasan. Perekonomian ditata sehingga kehidupan ekonomi mampu menggerakkan perekonomian rakyat dan tersedianya lapangan kerja serta kesempatan berusaha yang luas. Kehidupan beragama diinginkan penuh dengan toleransi dan saling pengertian serta saling menghormati.

Ketika era globlisasi seperti saat ini, tidak ada satu pun bangsa di dunia ini yang dapat mengisolasi dirinya dari bangsa-bangsa modern yang lain. Dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, sekat-sekat dan tembok-tembok antarnegara telah runtuh, dunia ini bagaikan sebuah desa global. Bangsa-bangsa di dunia ini dari satu sisi semakin terjadi saling interdependensi dan semakin terwujud sebagai satu sistem. Dalam percaturan global, kualitas bangsa kita akan dipertaruhkan, baik dalam bidang politik, ekonomi maupun budaya. Di bidang ekonomi misalnya, tahun 2003 nanti sudah akan diberlakukan perdagangan bebas ASEAN dan untuk kawasan Asia Pasifik tahun 2020. Dalam menghadapi tantangan di bidang perdagangan, misalnya, diperlukan bangsa yang di dalamnya merupakan sumber daya manusia yang mampu dan jeli melihat peluang pasar, peredaran barang dan modal. Dunia ekonomi yang bersifat global akan semakin menuntut adanya bangsa yang memiliki tenaga kerja yang mampu memperoleh, menguasai, menganalisis dan mengolah informasi dengan cepat. Ekonomi dan kehidupan manusia yang merupakan anggota suatu bangsa pada umumnya di masa mendatang akan berbasiskan ilmu pengetahuan dan informasi. Industri modern akan mengandalkan pada penguasaan IPTEK. Dalam pergaulan global selain memerlukan penguasaan bahasa internasional, juga harus mengindahkan tata krama pergaulan antarbangsa secara internasional. Jika tidak melakukannya, maka bangsa kita akan kehilangan kepercayaan. Kebudayaan kita, Nusantara yang mempunyai ciri khas dengan keanekaragaman akar-akar budaya yang unik tetap kita pertahankan dan kita lestarikan sebagai identitas bangsa. Kebudayaan asing yang masuk tidak begitu saja kita terima, namun harus disaring dan disesuaikan dengan kecocokan budaya kita.

Paradigma Pendidikan dan Sumber Daya Manusia di Era Global

Setiap sistem pendidikan tentunya tidak pernah berangkat dari tanpa konsep. Pendidikan itu sendiri tidak pernah netral tetapi ditentukan oleh pemahaman oleh konsep manusia. Ada yang mencanangkan bahwa pendidikan harus memanusiaikan manusia. Para ahli filsafat dan pendidikan seperti Socrates, J.J. Rousseau, Ivan Illich, P. Freire, Eric Fromm dan lain-lain merumuskan paradigma pendidikan berdasarkan berbagai citra manusia. Namun demikian rumusan-rumusan tersebut jika disimpulkan akan sampai pada titik kesamaan, yaitu pemuliaan manusia. Usaha-usaha pembebasan, baik pembebasan dari kebodohan, dari kemiskinan, dari perbudakan, dari keterbelakangan dan lain sebagainya merupakan usaha pemuliaan manusia. Berkat usaha-usaha tersebut setiap orang yang mengenyam pendidikan memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bersama. Tujuan akhir pendidikan adalah manusia memenuhi kebutuhan hidup pribadi, sosial dan spiritual, dalam relasinya dengan sesama manusia serta alam lingkungannya dan Tuhan, Maha pencipta. Manusia memiliki kemandirian dan kepribadian yang otonom.

Disinyalir bahwa sistem pendidikan kita selama ini cenderung memicu anak untuk melakukan kekerasan, bukan hanya secara fisik, namun juga secara simbolik. Terbukti di dalamnya banyak sekali aturan-aturan yang mengekang kreativitas, imajinasi dan merugikan peserta didik. Kekerasan itu sendiri sering dilakukan orang karena tidak memiliki dua hal, yaitu imajinasi dan wacana perubahan. Oleh karena itu ke depan, metodologi pendidikan perlu diubah, yaitu dengan menerapkan metode pendidikan partisipatif, menekankan bahwa peserta didik adalah makhluk yang dapat bereksplorasi, berpikir dan kreatif. Pendidikan tidak hanya tekstual, tetapi harus kontekstual yang mengundang peserta didik tertarik, tertantang, mencoba-coba, mengembangkan potensi, kreativitas dan dapat mampu mengaplikasikan ilmu yang diperolehnya.

Paradigma pendidikan perlu diperbaharui dengan menghubungkan teori-teori dan ilmu pengetahuan yang diberikan dengan keadaan, kejadian, kebutuhan dan sumber daya alam serta sumber daya manusia yang ada di lingkungan peserta didik. Etika dan moral sebagai modal bergaul baik di tingkat nasional maupun global tetap dilatihkan dan dibudayakan sejak dini. Untuk mewujudkan dambaan tersebut peserta didik sejak dini perlu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan seperti berikut ini.

1. Selain mempelajari ilmu pengetahuan di sekolah, peserta didik perlu diperkenalkan lingkungan sekolah di mana peserta didik berada. Mereka perlu diperkenalkan keadaan, kejadian dan kebutuhan sumber daya alam serta sumber daya manusia di lingkungan sekolah dan peserta didik setempat. Mereka juga perlu diberi informasi tentang sumber-sumber daya alam yang potensial untuk digali menjadi komoditi yang bermanfaat dan laku dipasarkan. Dengan begitu sejak dini siswa dapat mengenal lingkungannya dan mampu membaca peluang, tantangan dan solusi tentang hal-hal dan masalah yang ada di daerahnya sendiri. Lebih lanjut diharapkan, mereka mampu mengaplikasikan ilmunya dalam dunia nyata, dengan kata lain pengangguran terdidik dapat dihindarkan. Jika mereka mampu menggali, mengolah dan memanfaatkan sumberdaya alam setempat, maka tidak perlu mendatangkan tenaga dari daerah lain apalagi dari tenaga asing. Dengan demikian mereka yang merupakan putera daerah tersebut tidak merasa tertipu dan terjajah oleh saudara-saudaranya yang berasal dari daerah lain, sehingga tentu saja tidak mungkin ada niat untuk memerdekakan diri dan memisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Karena pengetahuan manusia maju dengan cepat dan makin lama makin cepat, hal ini membawa implikasi bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang akan makin cepat usang, makin tidak relevan, makin cepat kehilangan nilai. Jika ingin tetap "*up to date*", seseorang harus terus

menerus memperbaharui pengetahuannya. Masalah menemukan cara-cara belajar baru (*learn how to learn*) menjadi isu besar dalam bidang pendidikan sekarang ini, baik pendidikan di sekolah maupun di tempat kerja. Dalam era ilmu pengetahuan, sumber utama keunggulan bersaing perusahaan-perusahaan adalah kemampuannya untuk menciptakan dan mengelola pengetahuan, secara terus menerus untuk memperbaharui pengetahuannya dan mentransformasikan pengetahuannya menjadi sesuatu yang bernilai bagi konsumen atau masyarakat. Untuk menjaga kelangsungan hidupnya, organisasi-organisasi dituntut untuk menjadi organisasi belajar di mana belajar menjadi budaya, menjadi kesenangan, menjadi kebiasaan, dan menjadi kebutuhan bagi semua anggota organisasi. Di negara-negara maju, belajar dan bekerja sudah menjadi satu kesatuan. Tempat kerja sudah menjadi "Universitas".

3. Pendidikan bukanlah tanggung jawab guru/sekolah semata, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, yang diaktualisasikan sebagai tanggung jawab orang tua (keluarga), sekolah dan masyarakat. Dengan dukungan dari segala unsur tersebut diharapkan peserta didik kelak menjadi "dewasa" memiliki watak mulia/luhur dan terpuji selain berkemampuan dan berketerampilan untuk bekal hidup secara mandiri. Untuk mewujudkan impian tersebut, dalam setiap proses pendidikan dan pelatihan, etika dan moral harus selalu diberlakukan, pengawasan dilakukan oleh pelaksana pendidikan dan oleh peserta didik sendiri. Kegiatan pendidikan meliputi kecerdasan emosi, moral dan etika (*emotional, moral and ethical intelligence*), dan bukan semata-mata mengejar NEM (*IQ*). Agar peserta didik terbiasa bertindak dengan landasan moral, etika yang benar dengan dorongan dari dalam (*intrinsic motivation*), maka perlu dibudayakan iklim demokratis, otonomi, sehingga peserta didik memberanikan diri untuk mengambil inisiatif, proaktif dan bukan hanya reaktif. Selain keterampilan

kognitif, keterampilan afektif perlu dikembangkan pula secara proporsional. Dalam implementasinya setiap proses pembelajaran perlu diciptakan suasana yang kondusif, sehingga peserta didik diperlakukan sebagai pribadi yang berharga, didengar pendapatnya dan diperhatikan. Karena pendidikan merupakan tanggung jawab sekolah, keluarga dan masyarakat, maka sekolah/guru perlu membangun hubungan yang harmonis antara ketiga unsur tersebut. Sekolah perlu menekankan bahwa keluarga merupakan basis pendidikan moral, etika dan perilaku. Sekolah perlu mengingatkan bahwa keluarga harus memberikan sentuhan-sentuhan nilai moral untuk menghantarkan peserta didik menuju optimalisasi potensi kepribadian. Keluarga merupakan wahana perwujudan diri persiapan menjadi warga negara yang baik, perumbuhan menyeluruh dan terpadu serta persiapan untuk dunia dan akhirat.

4. Untuk menjawab tantangan perdagangan bebas di era global dan sekaligus menjadi warga negara Indonesia yang nasionalis serta bertanggungjawab terhadap masyarakatnya seperti disinggung di depan, maka perlu diciptakan pembelajaran yang mengedepankan pengembangan kemampuan, sikap/perilaku atau kepribadian yang utuh meliputi: "keimanan (*faith*)", "penemu (*inquirer*)", "pemikir (*thinker*)", "mampu berkomunikasi (*communication*)", "berani ambil resiko (*risk-takers*)", "berpengetahuan (*knowledgable*)", "berprinsip (*principled*)", "*open-minded*", "*well-balanced*", "*reflective dan corrective*". Salah satu pendekatan pembelajaran di sekolah adalah pendekatan "*enquiry*" dengan menekankan pada "*active learning*" yang dapat membawa ke ketuntasan belajar (*mastery learning*) dan pada gilirannya SDM yang berkualitas dapat dicapai. Gambaran tentang manusia Indonesia seutuhnya yang merupakan SDM berkualitas siap menghadapi era global didasarkan pada pendekatan nilai/perilaku yang memiliki unsur-unsur seperti disiplin, jujur, bertanggung

jawab, menghargai pendapat orang lain, toleransi antar agama, dapat dipercaya, serta sikap positif lainnya dapat disimak pada tabel 1. Pendekatan nilai/sikap dan perilaku sebagai model yang dikembangkan oleh UNESCO (1992), kemudian dijadikan acuan untuk mencoba mengembangkan suatu model manusia seutuhnya. Dalam model ini ditekankan pula prinsip *"learning how to learn and life long learning in everlasting changing modern society"* (Agus F. Tangyong, 1998).

Tabel 1. Model Manusia Indonesia Seutuhnya

| | |
|-------------|---|
| PHYSICAL | SEHAT |
| | - Physical Fitness (kesehatan jasmani) |
| | - Cleanliness (kebersihan) |
| | - Harmony with the material universe (keseimbangan dengan lingkungan) |
| | - Beauty (keindahan) |
| | - Art (seni) |
| INTELECTUAL | TRUTH |
| | - Knowledge (pengetahuan) |
| | - Creative and Critical thinking (kreatif dan berpikir kritis) |
| | - Problem Solving (memecahkan masalah) |
| | - Independency (Kemandirian) |
| | - Orientation into the future (orientasi ke masa depan) |
| SPIRITUAL | SPIRITUALITY |
| | - Faith in God (ketakwaan dan kerinduan pada Tuhan Yang Maha Esa) |
| | - Kerukunan antar umat beragama |
| | - Tolerance (saling menghargai dan toleransi) |
| SOCIAL | SOCIAL RESPONSIBILITY |
| | - Love / Respect (saling mengasihi/menghargai) |
| Family | - Fidelity (loyalitas) |
| | - Responsible Parenthood (tanggung jawab kekeluargaan) |
| Society | - Concern for other / common good (kesetiakawanan sosial) |
| | - Freedom/ Equality (kebebasan yang bertanggung jawab dan persamaan) |
| | - Social justice/ respect for human rights (keadilan sosial / menghargai hak asasi manusia) |
| | - Peace (kedamaian) |
| | - Social participation (partisipasi dalam kegiatan sosial) |
| ECONOMIC | ECONOMIC EFFICIENCY |

- Conservation of resources (konservasi sumber daya)
 - Work ethics (etika kerja)
 - Self-Reliance (berdiri sendiri)
 - Productivity (produktivitas)
 - Scientific and Technological Knowledge and Communication (kemampuan serta - komunikasi IPTEK)
 - Work Efficiency (efisiensi kerja)
 - Entrepreneurship (wira usaha)
- POLITICAL NASIONALISM
- Common Identity (kebersamaan)
 - National Unity (Kesatuan dan persatuan)
 - Esteem of National Heros (menghormati pahlawan)
 - Commitment (tanggung jawab)
 - Civic Consciousness (kesadaran bernegara)
 - Solidarity (solidaritas)
 - Loyal to Country (setia kepada tanah air)
 - GLOBAL SOLIDARITY
- International Understanding and Co-operation (kerjasama internasional)
- (UNESCO APEID, 1992 hal. 70).

Untuk mendapatkan SDM yang mendekati gambaran yang dikeluarkan oleh UNESCO di depan, tentu perlu diciptakan suatu kondisi pendidikan yang mendukung dengan segala pirantinya baik lunak maupun keras. Pemerintah hendaknya bertindak tegas terhadap lembaga-lembaga, kelompok-kelompok /oknum yang telah memperjualbelikan ijazah dan gelar. Di samping itu masyarakat sendiri seharusnya tidak mengakui kepemilikan ijazah dan gelar belian tersebut.

Penutup

Berdasarkan keseluruhan uraian di depan akhirnya dapat diambil butir-butir penting, yaitu bahwa kondisi bangsa kita Indonesia masih dalam kondisi memprihatinkan dengan adanya krisis multidimensional. Stabilitas keamanan belum mantap yang dapat berimbas pada kerawanan soial, supremasi hukum belum benar-benar ditegakkan, kerawanan sosial, kecenderungan terjadinya

tindak kekerasan, main hakim sendiri dan pada gilirannya terpuruknya perekonomian. Pendidikan belum benar-benar ditangani dengan ditandai adanya rendahnya anggaran pendidikan. Di satu sisi perkembangan tata hubungan global semakin maju dengan pesat, di sisi lain bangsa kita belum selesai menangani rekonsiliasi antar komponen bangsa yang merupakan prasarat terciptanya keamanan dan berjalannya roda perekonomian dan sektor-sektor lain.

Sumberdaya manusia Indonesia yang berkualitas yang memiliki kepribadian dengan etika dan moral yang tinggi merupakan kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan sekaligus peluang di era global. Bidang pendidikan adalah merupakan wahana pembentuk pribadi generasi muda yang pada saatnya nanti berkiprah dan ambil bagian dalam percaturan global. Untuk menghindari konflik, kekerasan, dan bentrokan fisik, generasi muda yang dimaksud perlu dibiasakan dan dibudayakan menghargai perbedaan, demokratis, mentaati kesepakatan/supremasi hukum, serta mengedepankan kepentingan bangsa (orang banyak) dari pada kepentingan pribadi dan golongan.

Namun demikian, sistem pendidikan kita belum sepenuhnya mendukung terciptanya *out put* pendidikan yang memiliki ciri-ciri seperti dijelaskan di depan. Paradigma pendidikan perlu diperbaharui dengan menekankan bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia. Peserta didik dipersiapkan agar mampu berpartisipasi dalam kehidupan bersama. Selain manusia memenuhi kehidupan pribadi, ia juga harus berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan spiritual dalam relasinya dengan sesama serta juga kehidupan lingkungannya dan Tuhan yang Maha Esa.

Pendidikan kita perlu menerapkan metode partisipatif, menekankan bahwa peserta didik adalah makhluk yang dapat bereksplorasi, berpikir dan kreatif. Pembelajaran dengan menjejalkan pengetahuan (*banking system*) dan menghafal, berangsur-angsur perlu kita tinggalkan. Beri kesempatan peserta didik untuk bereksplorasi, mengembangkan potensi, kreativitas dan bekerja sama

dalam memecahkan masalah, sehingga ilmu yang didapat peserta didik dapat diaplikasikan. Pembelajaran tidak hanya tekstual, namun harus kontekstual.

Pendidikan yang melahirkan insan yang mampu berkomunikasi baik di tingkat lokal, nasional dan global merupakan kebutuhan mendesak. Jika bangsa kita tidak mampu berkomunikasi dengan etika internasional, tentu akan tersingkir dari percaturan dunia. Sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani, berpengetahuan, berpikir kritis, kreatif, mandiri, toleran, tanggung jawab, menghargai hak asasi manusia, memiliki jiwa kewirausahaan memelihara persatuan dan kesatuan, penuh kedamaian, setia kepada tanah air serta mampu bekerja sama secara internasional sangat dibutuhkan di era global ini.

Dengan usaha memperbaharui paradigma pendidikan, pelan tapi pasti, diharapkan *out put* pendidikan dapat memecahkan masalah bangsa dengan krisis multidimensionalnya. *Out put* pendidikan diharapkan tidak lagi menjadi beban pemerintah dan masyarakat seperti masih membengkaknya pengangguran terdidik saat ini.

Daftar Pustaka

- Agus F. Tangyong. 1998. *Learning, Teaching, Evaluating*. Jakarta: Sekolah Tiara Bangsa.
- Agus F. Tangyong. 2001. Pendidikan Nasional Dalam Konteks Perubahan ke Arah Masa Depan, Suatu Gagasan. *Makalah Seminar: Reformasi Pendidikan Nasional*. Yogyakarta : Depdiknas, Badan Penelitian dan Pengembangan. Universitas Negeri Yogyakarta
- Revrison baswir. (2001, April, 10). *Mental dan Tingkat Korupsi Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Pt. BERNAS.
- Tilaar, H.A.R. (1998). *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*, Magelang : Tera Indonesia.

Tilaar, H.A.R. (1999). Peran Pendidikan dalam Mewujudkan Indonesia Baru.
*Makalah disampaikan pada SEMLOK FIP, JIP Seluruh Indonesia 5 - 7
Oktober 1999.*

UNESCO. (1992). *Education for Effective Development*. Bangkok.